



RENJA 2023

Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dibuat merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang seharusnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran dari Renstra, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan RPJMD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus berkarya lebih baik sehingga tujuan, sasara dan arah kebijakan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat tercapai.

Purwakarta, Juli 2022



INSPEKTUR

Ir. H. Nurhidayat, MM., CGCAE

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP 19640515 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.....	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	37
4.1 Rencana Kerja.....	37
4.2 Pendanaan Indikatif.....	38
BAB V PENUTUP.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 Kabupaten Purwakarta.....	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.....	16
Tabel 2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Purwakarta.....	21
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Purwakarta.....	31
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.....	33
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiran Maju Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta Perangkat Daerah Inspektorat Daerah.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif dan Profesional dan Peningkatan Jumlah Aparatur yang memiliki Jabatan Fungsional APIP, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya pada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensi dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian intern) mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja dan profesionalitas tenaga pemeriksa dan meningkatkan sistem informasi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum

untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Para aparatur pengawasan lebih meningkat kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan adalah salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,3 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah, dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) Tahun, serta Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam menunjang implementasikan kebijakan dengan menselaraskan sasaran strateginya khususnya aspek Pengawasan, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud dalam visi Bupati Purwakarta terpilih yaitu **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”** dimana visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dimana tema pembangunan daerah untuk tahun 2023 yaitu : **“PEMBANGUNAN PARIPURNA MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”**.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023,

yang mengamanatkan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional yaitu :

1. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan : 1) kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; 2) pengawasan prioritas nasional dan atau daerah; 3) pengawasan Reformasi Birokrasi dan 4) penegakan Integritas; dan
2. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka perlu menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor ; 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta harus dapat melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consuling Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning Sytem* (sebagai peringatan dini).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja Perangkat Daerah. Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Renja yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan wujud tindak lanjut upaya pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887));
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
22. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan yang diharapkan agar menjadi acuan terhadap serangkaian pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini dituangkan kedalam 5 (lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inpektorat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan rencana kerja program dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan mereview pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) yang diuraikan sesuai dengan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan rencana kerja ditahun sebelumnya (2021) dapat di lihat pada tabel 2.1.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan									
6.01	Inspektorat									
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini B	Opini B	Opini B	Opini B	Opini B	Opini B		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	2 dok		
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	2 dok		

6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 bln	12 bln	14 bln	117%	100%	12 bln	12 bln	100%	100%	12 bln	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Selesai Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	3 Dokumen	3 Dokumen
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Rekonsiliasi dan Laporan BMD yang selesai disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	6 Dokumen	6 Dokumen
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan BMD yang selesai disusun dan dilaporkan	5 dok	5 dok	1 dok	100%	100%	1 dok	1 dok	100%	100%	5 dok	5 dok
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pakaian khusus Inspektoral yang disediakan	65 ptg	65 ptg	1 keg	100%	100%	1 keg	1 keg	100%	100%	65 ptg	65 ptg
6.01.01.2.05.09		Jumlah Diklat yang diikuti dalam rangka Pengembangan Tenaga Pengawas dan Aparatur Pengawas	5 diklat	5 diklat	1 keg	100%	100%	1 keg	1 keg	100%	100%	5 diklat	5 diklat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/komponen instansi/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	10 jenis	10 jenis	1 keg	100%	100%	1 keg	1 keg	100%	100%	10 jenis	10 jenis

6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan peralatan kantor selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan Rumah Tangga selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	100%	10 item	10 item	100%	100%	100%	100%	100%		
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan logistik kantor selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	100%	10 item	10 item	100%	100%	100%	100%	100%		
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	100%	7 item	7 item	100%	100%	100%	100%	100%		
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan makanan dan minuman dalam rangka fasilitasi kunjungan tamu selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	100%	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%		
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	100%	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%		
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya alat untuk memperkuat penangkapan sinyal wifi pada computer	2 jenis	2 jenis			2 jenis				2 jenis		
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan											
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) Operasional Pengawasan	5 Unit	5 Unit			5 Unit				5 Unit		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis		

6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselesaikannya pembayaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening	4 rekening	4 rekening	4 rekening	100%	4 rekening	4 rekening	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Frekuensi pembayaran gaji/tenaga piket malam dikantor Inspektorat Daerah Jumlah pembayaran gaji tenaga PTT di Inspektorat Daerah Jumlah Frekuensi pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan Non PNS yang dibayarkan Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan	12 bln	12 bln	1 keg	1 keg	100%	1 keg	12 bulan	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas aset Barang Milik daerah Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara/ditingkatkan/ditata	5 unit	5 unit	25 unit	25 unit	100%	25 unit	5 unit	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasioal yang dibayar pajaknya	22 unit	22 unit	35 unit	35 unit	100%	35 unit	22 unit	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Inspektorat Daerah	100%	100%	1 keg	1 keg	100%	1 keg	100%	
6.01.02	Program Penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah dilaksanakan Opini Penilaian LKPD Kabupaten	46 opd	46 opd	46 opd	46 opd	90%	46 opd	WTP	
		Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

			B	B									
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian SAKIP Kabupaten Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terutama dalam pengelolaan anggaran baik SKPD maupun di Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Pengawasan Kinerja	46 opd	46 opd	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	46 opd	46 opd	100%
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Pengawasan Keuangan	46 opd	46 opd	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	46 opd	46 opd	100%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen yang Reviu	5 dok	5 dok	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	5 dok	5 dok	100%
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen yang Reviu	4 dok	4 dok	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	4 dok	4 dok	100%
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah desa yang dilakukan reviu	183 desa	183 desa	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	183 desa	183 desa	100%
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Pelaksanaannya bekerja sama dengan tenaga ahli	2 keg	2 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	2 keg	2 keg	100%
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti	55%	55%	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	55%	80%	100%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertaksannya Penanganan Kasus Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 kasus	7 kasus									
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah kasus yang selesai ditangani	2 kasus	2 kasus	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	2 kasus	2 kasus	100%
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat / Pelimpahan Kasus dari APH yang dilakukan Audit dengan tujuan tertentu	5 kasus	5 kasus	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	5 kasus	5 kasus	100%
6.01.03	Program Perumusan kebijakan , pendampingan Dan asistensi	Peningkatan Kapabilitas APIP	level 3	level 3							level 3	level 3	
		Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBKY) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM)	2 opd	2 opd							2 opd	2 opd	

6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase OPD yang mendapatkan nilai 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	90%	90%					90%			
6.01.03.2.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Inspektorat	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	1 Kegiatan
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	100%	100%					100%			100%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	level 3	level 3	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	level 3
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	14 opd	14 opd	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	14 opd
6.01.03.2.02.03	Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Jumlah OPD Dengan Nilai Diatas 75% Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Korupsi	90%	90%	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	85%
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang Dilakukan Survei Penilaian Integritas	30 OPD	30 OPD	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg				20 OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2022 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta, dengan jumlah Anggaran Perubahan sebesar Rp.30.251.213.103,- terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan Tunjangan dengan besaran anggaran Rp. 12.498.754.037,- terealisasi Rp. 11.783.930.472

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung sebesar terdiri dari 3 Program dan 9 Kegiatan Rp. 10.752.138.905,- terealisasi Rp.10.037.234.210

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 dan perkiraan realisasi capaian kinerja tahun 2022 serta proyeksi capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Level Kapabilitas APIP	1	3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	
2.	Persentase Penyelesaian Tindakan Lanjut Temuan APIP pada Perangkat Daerah	1	90	55	65	75	80	90	26,68	53,07	66,55	85,15	90	

3.	Predikat Penilaian SAKIP Kabupaten	Opini	AA	B	BB	A	A	A	AA	BB	BB	A	A	AA
4.	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1	2	2
5.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah	1	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46

6.	Jumlah Diklat yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Opini Penilaian LKPD Kabupaten	1	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 s.d 2023 diproyeksikan tercapai dari indikator yang telah ditargetkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih.
2. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),
3. Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah.
4. Tuntutan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan implementasi SAKIP.
5. Minimnya SDM Pengawasan khususnya JFA dan JF P2UPD dan tenaga administrasi lainnya.
6. Minimnya SDM Pengawasan yang bersertifikat di bidang Investigasi.
7. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan.
8. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih terbatas.
9. Target tahunan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum tercapai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Alokasi anggaran kegiatan (belanja langsung) untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 24.567.951.867 (*dua puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*). Apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah sekurang-kurangnya sebesar **0,50%** (*nol koma lima puluh persen*) dari APBD untuk Inspektorat Kab/Kota”. Maka alokasi anggaran tersebut masih rendah/kurang. Akan tetapi, Inspektorat Daerah berupaya maksimal dan optimal untuk merealisasikan/mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD maupun RPJMD.

Untuk itu kami mengajukan usulan untuk alokasi dana/pagu indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sesuai dengan Rancangan Awal Rencana RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan penambahan anggaran untuk kegiatan Survei Penilaian Integritas dimaksud, dengan total usulan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebesar Rp. 30,700,872,503,- (*Tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah*).

Secara lengkap dapat dilihat tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Capaian Sakip Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90%	26.505.872.503	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Purwakarta	Capaian Sakip Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90%	27.055.600.000	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun	5 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun	5 Dokumen	12.000.000	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	17.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang Yang Menerima dan Gaji Tunjangan ASN	14 Bulan	23.459.572.813	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	24.000.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	28.999.690	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.000.000

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah										
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.600.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	350.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	390.000.000
Administrasi Umum dan Perangkat Daerah										
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	65.000.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	310.000.000
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000

10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000
11	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Pengadaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	170.000.000
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	142.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	160.000.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	170.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	170.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
14	Pengadaan Mebel	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	0

16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	150.000.000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disebrkan	1 Laporan	700.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disebrkan	1 Laporan	700.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 Unit	275.000.000	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 Unit	280.000.000

19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dana Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dana Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang dibayarkan Pajaknya	25 Unit	70.000.000	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	250.000.000	
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Purwakarta	Opini Penilaian Sakip Kabupaten; LKPD Kabupaten; Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	B;WTP	3.395.000.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Purwakarta	Opini Penilaian Sakip Kabupaten; LKPD Kabupaten; Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	B;WTP	3.160.000.000	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal											
21	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	900.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	900.000.000	Kegiatan Prioritas

22	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.100.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.100.000.000	Kegiatan Prioritas
23	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	10.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	50.000.000	Kegiatan Prioritas
24	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	20.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	10.000.000	Kegiatan Priorita
25	Pengawasan Desa	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	500.000.000	Pengawasan Desa	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	500.000.000	Kegiatan Priorita
26	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Doknume	300.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Doknume	300.000.000	Kegiatan Priorita
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu											

27	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1 Laporan	25.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Purwakarta	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1 Laporan	20.000.000	
28	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	250.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	250.000.000	
III	Program Prumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Purwakarta		100%	993.290.562	Program Prumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Purwakarta		100%	1.045.239.658	
Pendampingan dan Asistensi											
29	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20 Perangkat Daerah	750.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	20 Perangkat Daerah	600.000.000	
30	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Purwakarta	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	100.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Purwakarta	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14 OPD	80.000.000	

31	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	150.0000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Purwakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	140.0000.000	Kegiatan Prioritas
----	---	-----------------	--	---------------------	--------------	---	-----------------	--	---------------------	--------------	--------------------

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah hanya lingkup pembinaan dan pengawasan reguler (PKPT) serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi masyarakat dapat mengajukan laporan (Dumas) atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					Tidak ada program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Khususnya pada Tugas-tugas di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional untuk Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Perencanaan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melalui berbagai kegiatan dalam satu tahun. Dalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam satu tahun.

Adapun penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta di Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1	Mewujudkan Inspektorat Sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Optimalnya Fungsi Inspektorat sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	1. Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Purwakarta	Level 3
			2. Persentase Nilai SAKIP Kategori Baik (B) pada OPD	85%
			3. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Mendapatkan Predikat WBK dan WBBM	2 OPD
			4. Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang rekomendasinya selesai ditindaklanjuti	90%
			5. Opini BPK terhadap Penilaian LKPD	WTP

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan terhadap pencapaian kinerja tahun 2022 terbagi dalam 4 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Program dan kegiatan inilah yang mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Program dan kegiatan tersebut yaitu:

3.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota

- I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
- III. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- V. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3.3.2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
- I. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
- II. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3.3.3. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- I. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3) Reviu Laporan Kinerja
- 4) Reviu Laporan Keuangan
- 5) Pengawasan Desa
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

II. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3.3.4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

I. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

II. Pendampingan dan Asistensi

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2023 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satuan kerja mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat maupun dunia usaha.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Kabupaten/Kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan baik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

4.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Renja Tahun 2023, setiap tahunnya direncanakan mengalami peningkatan sebanyak rata-rata 10% setiap tahunnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Purwakarta
Perangkat Daerah : Inspektoriat Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektoriat Daerah							
6 1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Sikip Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			30,700,872,503			31,035,600,000
6 1 1	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi yang disusun		5 Dokumen	40,000,000		5 Dokumen	29,000,000
6 1 1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	5 Dokumen	20,000,000	APBD	5 Dokumen	12,000,000

6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	3 Laporan	20,000,000	APBD	3 Laporan	17,000,000
6	1	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,488,572,503		1 Kegiatan	24,012,000,000
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	14 Bulan	23,459,572,813	APBD	12 Bulan	24,000,000,000

6	1	1	2.02	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	1 Laporan	28,999,690	APBD	1 Laporan	12,000,000
6	1	1	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan		2 Kegiatan	9,600,000		2 Kegiatan	9,600,000
6	1	1	2.03	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	1 Laporan	9,600,000	APBD	1 Laporan	9,600,000
6	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan		1 Kegiatan	350,000,000		1 Kegiatan	390,000,000
6	1	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Purwakarta	20 Orang	350,000,000	APBD	20 Orang	390,000,000

6	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawain yang dilaksanakan	7 Kegiatan	1,237,700,000	7 Kegiatan	1,175,000,000
6	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purwakarta	75,000,000	1 Paket	65,000,000
6	1	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Purwakarta	300,000,000	1 Paket	310,000,000
6	1	1	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Purwakarta	100,000,000	1 Paket	100,000,000
6	1	1	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Purwakarta	300,000,000	1 Paket	200,000,000
6	1	1	2.06	Penyediaan Barang dan Pengerahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengerahan yang Disediakan	Purwakarta	150,000,000	1 Paket	170,000,000
6	1	1	2.06	Fasilitas Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Purwakarta	142,700,000	3 Laporan	160,000,000

6	1	1	2.06			Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	1 Laporan	170,000,000	APBD	1 Laporan	170,000,000
6	1	1	2.07			Pengadaan Barang Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Purwakarta	10 Unit	100,000,000		10 Unit	0
6	1	1	2.07	5			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Purwakarta	1 Paket	100,000,000	APBD	1 Paket	0
6	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Daerah yang dibutuhkan		3 Kegiatan	870,000,000		3 Kegiatan	840,000,000
6	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	100%	20,000,000	APBD	2 Jenis	4.628.750
6	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purwakarta	1 Laporan	150,000,000	APBD	1 Laporan	140,000,000
6	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 Laporan	700,000,000	APBD	1 Laporan	700,000,000

6	1	1	2.09	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Daerah Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang di butuhkan	Purwakarta	4 Kegiatan	410,000,000	4 Kegiatan	600,000,000	4 Kegiatan
6	1	1	2.09	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Purwakarta	22 Unit	275,000,000	22 Unit	280,000,000	22 Unit
6	1	1	2.09	2	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purwakarta	25 Unit	60,000,000	25 Unit	70,000,000	25 Unit
6	1	1	2.09	6	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Purwakarta	10 Unit	75,000,000	10 Unit	250,000,000	10 Unit
6	1	2					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian SAKIP Kabupaten	Purwakarta	8 Opini	3,195,000,000	8 Opini	3,160,000,000	8 Opini
							Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan			24 OPD		24 OPD		24 OPD

						Opini Penilaian LKPD Kabupaten	WTP Opini			WTP Opini		WTP Opini
6	1	2	2.01			Jumlah OPD yang dilakukan Pengawasan	48 OPD	2,920,000,000	48 OPD	2,890,000,000	48 OPD	2,890,000,000
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
6	1	2	2.01	1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	900,000,000	1 Laporan	900,000,000	1 Laporan	900,000,000
6	1	2	2.01	2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1,100,000,000	1 Laporan	1,100,000,000	1 Laporan	1,100,000,000
6	1	2	2.01	3		Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	80,000,000
6	1	2	2.01	4		Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	10,000,000
6	1	2	2.01	5		Pengawasan Desa	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000

6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Purwakarta	5 Dokumen	300,000,000	APBD	5 Dokumen	300,000,000
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Dengan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus yang dilaksanakan terhadap penanganan, penyelesaian keuangan negara/daerah dan pengawasan dengan tujuan tertentu		12 kasus	275,000,000		12 Kasus	250,000,000
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Purwakarta	1 Laporan	25,000,000	APBD	1 Laporan	20,000,000
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Purwakarta	1 Laporan	250,000,000	APBD	1 Laporan	250,000,000

6	1	3				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan Level Kapabilitas APiP		3 Level	1,000,000,000		3 Level	820,000,000
							Persentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		0.90 Persen			0.90 Persen	
							redikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah		2 OPD			2 OPD	
6	1	3	2.02			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pengawasan Pendampingan dan Asistensi OPD		47 OPD	1,000,000,000		47 OPD	1.006.065.716
6	1	3	2.02	1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Purwakarta	20 Perangkat Daerah	750,000,000	APBD	20 Perangkat Daerah	600,000,000

6	1	3	2.02	2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Purwakarta	10 Perangkat Daerah	100,000,000	APBD	10 Perangkat Daerah	80,000,000
6	1	1	2.02	4		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Purwakarta	10 Perangkat Daerah	150,000,000	APBD	10 Perangkat Daerah	140,000,000

BAB V PENUTUP

Sesuai maksud dan tujuan yang diinginkan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang tersedia maka Renja ini juga menjadi bagian tahapan proses perencanaan tahunan yang berkelanjutan dan sistematis dari Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Dalam penyusunan Renja ini kami berupaya untuk menelaah dan memperhatikan kondisi internal dan eksternal Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang selalu berkembang dan diselaraskan dengan langkah-langkah yang dilakukan sesuai visi Kabupaten Purwakarta yaitu : **“Purwakarta Istimewa”**

Demikian pula dalam pencapaian Sasaran, Strategis Organisasi, kami juga berupaya melalui Renja Tahun 2023 untuk mereviu Sasaran Kinerja agar memenuhi karakteristik, spesifik, terukur, jelas, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan tepat waktu.

Purwakarta, Juli 2022



Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008